

LANGKAH-LANGKAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL DALAM BIDANG EKONOMI

Beny Sitakar¹, Ayu Andini², Nadya Dewi Anggita³, Suhairi⁴
benysitakar@gmail.com¹, ayuandini890@gmail.com², nadyaanggita33@gmail.com³,
suhairi@uinsu.ac.id⁴

UIN Sumatera Utara

ABSTRAK

Globalisasi di bidang perekonomian telah mendorong munculnya perdagangan lintas batas negara yang tidak terkekang, ditandai dengan perdagangan bebas dimana pergerakan barang, jasa dan manusia dari dan ke suatu negara tidak mengalami banyak hambatan. Skenario ini menghadirkan peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia. Sisi positifnya, hal ini memudahkan masuknya barang dan jasa produksi Indonesia ke pasar luar negeri, serta mengurangi hambatan non-tarif terhadap produk Indonesia. Demikian pula, pekerja Indonesia mungkin akan lebih mudah bekerja di luar negeri dengan pembatasan imigrasi yang lebih sedikit. Namun sisi sebaliknya adalah potensi ancaman bagi Indonesia karena barang, jasa, dan tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia tanpa hambatan berarti. Hal ini dapat menyebabkan ketatnya persaingan pasar domestik dalam hal kualitas barang, jasa dan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun internasional. Oleh karena itu, perlu disusun strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi, dan memastikan Indonesia memperkuat posisinya dalam memanfaatkan peluang dalam persaingan ekonomi global. Artikel ini akan menguraikan beberapa strategi yang dapat diterapkan Indonesia untuk mengatasi tantangan global di bidang perekonomian.

Kata Kunci: Globalisasi, Ekonomi, Daya saing, Pasar bebas.

PENDAHULUAN

Masuknya budaya asing ke Indonesia melalui berbagai media massa, termasuk platform elektronik, cetak, dan internet, memberikan dampak signifikan terhadap evolusi budaya Indonesia. Pertukaran pengaruh timbal balik merupakan aspek yang melekat dalam interaksi komunitas. Indonesia, sebagai sebuah bangsa, telah mengalami proses dinamis dalam mempengaruhi dan dipengaruhi melalui interaksinya dengan beragam komunitas. Kemajuan masyarakat dapat dicapai melalui interaksi dengan entitas eksternal, seperti yang ditunjukkan oleh proses globalisasi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, globalisasi melampaui dimensi ekonomi; itu mencakup aspek budaya, yang melibatkan pelestarian nilai dan makna yang bermakna.

Globalisasi merupakan suatu fenomena khas dalam peradaban manusia yang terus mengalami kemajuan dalam masyarakat global. Pesatnya evolusi teknologi informasi dan teknologi komunikasi berperan penting dalam mempercepat proses globalisasi. Fenomena ini sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan, menghadirkan tantangan dan permasalahan baru yang memerlukan tanggapan bijaksana untuk memanfaatkan globalisasi demi kepentingan umat manusia. Istilah “globalisasi” muncul sekitar dua dekade lalu dan mendapatkan popularitas luas sebagai ideologi baru dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. Hal ini telah dengan mudah diterima dan diakui di seluruh dunia. Wacana seputar globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang secara fundamental mengubah dunia yang kita kenal sekarang.

Globalisasi adalah topik yang banyak diperdebatkan, mencakup pergerakan barang dan jasa yang bebas dan tidak terbatas antar negara dalam skala global. Hal ini tidak hanya

mencakup pertukaran komoditas fisik tetapi juga transfer teknologi, kebiasaan konsumsi, praktik pendidikan, nilai-nilai budaya, dan banyak lagi, seiring dengan keterbukaan satu negara terhadap negara lain. Digambarkan sebagai suatu proses oleh A.G. McGrew pada tahun 1992, globalisasi menandakan sebuah skenario di mana peristiwa, keputusan, dan aktivitas yang terjadi di satu wilayah di dunia dapat berdampak signifikan terhadap individu dan komunitas di belahan dunia yang jauh.

Chacholiades (1978) menegaskan bahwa keterlibatan dalam perdagangan internasional adalah pilihan sukarela, menekankan kebebasan negara untuk berpartisipasi. Secara internal, keputusan suatu negara untuk terlibat dalam perdagangan global dipandang sebagai pilihan yang disengaja dan bertujuan untuk saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Argumen yang mendasarinya adalah bahwa perdagangan internasional, dibandingkan dengan tidak adanya perdagangan sama sekali, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang berpartisipasi secara keseluruhan. Kindleberger dan Lindert (1978) mendukung gagasan ini dengan berpendapat bahwa perdagangan menghasilkan peningkatan efisiensi ekonomi, menawarkan keuntungan melalui perbedaan harga relatif dan spesialisasi dalam produksi.

Intinya, premis teoritis liberalisasi perdagangan menganjurkan penghapusan berbagai bentuk intervensi dan hambatan. Penghapusan ini diperkirakan akan merangsang peningkatan besar dalam volume perdagangan, sehingga menghasilkan penciptaan nilai tambah yang lebih besar. Hasil yang diharapkan adalah dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Secara praktis, proses liberalisasi perdagangan mempunyai berbagai bentuk. Selain tindakan sepihak, negara-negara memilih liberalisasi dengan mendukung kerja sama perdagangan internasional melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti APEC, AFTA, dan WTO. Ini adalah jalur yang disukai negara-negara dagang, termasuk Indonesia. Beberapa ekonom berpendapat bahwa liberalisasi memberikan harapan bagi negara-negara berkembang dan masyarakat miskin karena hal ini diperkirakan akan mengakibatkan lonjakan ekspor produk-produk padat karya.

Selain itu, bentuk liberalisasi ini, yang mengharuskan peningkatan daya saing produk, dipandang sebagai katalis untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dicapai melalui perluasan industri manufaktur yang berfokus pada pengolahan hasil pertanian.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yang meliputi pengumpulan, pengorganisasian, interpretasi, dan analisis data untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan informasi yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai karakteristik dan keistimewaan suatu populasi atau wilayah tertentu, sehingga memfasilitasi pengambilan kesimpulan yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI GLOBALISASI BIDANG EKONOMI

Munculnya globalisasi tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh terhadap dinamika suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia. Dampak globalisasi mencakup spektrum dampak positif dan negatif, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan banyak lagi.

Proses globalisasi yang sedang berlangsung, ditambah dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), membawa pergeseran lanskap strategis yang

sangat mempengaruhi kelangsungan dan pembangunan berkelanjutan entitas nasional dan negara. Secara eksternal, globalisasi mendorong interaksi antar budaya antar negara secara global, dan Indonesia juga tidak kebal terhadap dinamika ini. Pada dasarnya, globalisasi mengarah pada transformasi sosial yang signifikan, meskipun penting untuk dicatat bahwa tidak semua perubahan ini sejalan dengan kemajuan masyarakat.

Dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sangat besar, mencakup aspek positif dan negatif. Pengaruh ini meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, ideologi, dinamika sosial, dan budaya. Globalisasi memanifestasikan dirinya dalam berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan banyak lagi. Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi globalisasi. Pesatnya kemajuan teknologi menjamin tersebar luasnya informasi dari berbagai jenis dan kepentingan di seluruh dunia. Akibatnya, karena pesatnya kemajuan teknologi, globalisasi menjadi fenomena yang tak terhindarkan dan meluas.

Untuk menghadapi globalisasi secara efektif, Indonesia harus memperkuat posisinya di berbagai bidang, dengan penekanan khusus pada penguatan sektor ekonomi. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan beberapa langkah penting yang harus diambil Indonesia di bidang perekonomian. Beberapa langkah yang dapat ditindaklanjuti meliputi:

a. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Untuk meningkatkan daya saing

Industrialisasi merupakan hal yang sangat penting di semua sektor, karena industrialisasi berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan teknologi produksi yang lebih baik. Penerapan teknologi produksi yang maju merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Biasanya, industrialisasi dipelopori oleh investor besar yang memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan kecerdasan kewirausahaan. Meskipun demikian, menarik investor besar untuk berinvestasi di Indonesia mempunyai tantangan yang besar. Banyak faktor internal dan eksternal yang perlu diatasi, antara lain stabilitas politik, pungutan liar, penegakan hukum, infrastruktur, dan lain-lain.

Upaya berkelanjutan untuk menarik investor asing tetap penting untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan dan menciptakan lapangan kerja. Diakui bahwa investor besar mempunyai kapasitas untuk mengubah lanskap ekonomi suatu wilayah dengan cepat dan mendalam. Namun, memperkuat perekonomian akar rumput juga sama pentingnya. Meskipun hal ini mungkin tidak menghasilkan transformasi yang cepat dan drastis, peningkatan strata ekonomi bawah akan berkontribusi terhadap ketahanan dan swasembada perekonomian Indonesia.

Perekonomian akar rumput pada umumnya bersifat padat karya, dan meskipun terdapat aliran dana keluar yang serupa, perekonomian ini menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan dengan industri padat modal. Penguatan bisnis akar rumput akan meningkatkan daya beli, sehingga meningkatkan permintaan barang dan jasa. Meningkatnya permintaan ini menciptakan pasar potensial bagi investor, yang pada gilirannya akan lebih bersemangat untuk berinvestasi. Siklus positif ini mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Namun, meningkatkan daya saing di tingkat akar rumput mempunyai tantangan yang besar. Hambatan utama dalam upaya ini meliputi terbatasnya akumulasi modal dan kurangnya pengetahuan. Berbeda dengan investor besar yang mudah mengadopsi dan menerapkan teknologi terkini, individu dengan modal minim menghadapi kesulitan dalam bersaing. Pemahaman yang kurang terhadap konsep manajemen bisnis semakin menghambat pembentukan bisnis yang kuat. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai penjualan produk dan pemasaran menambah kompleksitas.

Pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan ini melibatkan inisiatif pemerintah

yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan koperasi. Pendirian koperasi memudahkan koordinasi antar pemilik usaha yang memiliki karakteristik serupa. Melalui upaya kerja sama, mereka dapat mengumpulkan sumber daya untuk memperoleh peralatan yang diperlukan, sehingga meningkatkan nilai tambah produk mereka. Pendekatan kolaboratif ini terbukti menjadi tantangan bagi operasi independen.

Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan merangsang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 pada tanggal 1 September 2014. Arahan ini dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, mengamanatkan pejabat pemerintah di seluruh negara untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam lingkup tugas, fungsi, dan wewenang mereka. Tujuannya adalah untuk mendorong pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan mempersiapkan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2015.

Aspirasi di balik Inpres ini adalah dengan berpegang pada strategi fundamental yang diprioritaskan, daya saing dapat terus ditingkatkan. Strategi-strategi tersebut meliputi:

1. Inpres tersebut menggarisbawahi pentingnya memajukan pembangunan industri nasional dengan fokus khusus pada pemberian prioritas industri untuk memenuhi pasar ASEAN dan mengamankan pasar dalam negeri. Selain itu juga menekankan perlunya pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penelitian, serta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Inpres tersebut menekankan pembangunan pertanian, khususnya dengan tujuan meningkatkan investasi langsung di sektor pertanian dan memperluas akses pasar.
3. Inpres ini menekankan pentingnya pembangunan sektor kelautan dan perikanan, serta menekankan perlunya memperkuat institusi dan posisi kelautan dan perikanan. Perjanjian ini lebih lanjut menekankan peningkatan daya saing di bidang kelautan dan perikanan, konsolidasi pasar domestik, serta penguatan dan perluasan pasar ekspor.
4. Instruksi Presiden tersebut menyoroti pengembangan energi, dengan penekanan khusus pada peningkatan subsektor ketenagalistrikan dan pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya bahan bakar minyak. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya mempromosikan sumber energi baru dan terbarukan, praktik konservasi energi, dan meningkatkan pasokan energi dan listrik untuk meningkatkan daya saing dibandingkan dengan negara-negara dengan infrastruktur yang unggul.

Selain sektor-sektor tersebut, terdapat sepuluh bidang pembangunan lainnya yang meliputi infrastruktur, pembentukan sistem logistik nasional, perbankan, investasi, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketenagakerjaan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, dan kewirausahaan.

Sungguh menggembirakan untuk dicatat bahwa upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing di Indonesia secara progresif telah membuahkan hasil yang menjanjikan, meskipun harus diakui bahwa masih ada beberapa bidang yang memerlukan upaya kolektif untuk perbaikan lebih lanjut. Lintasan positif daya saing Indonesia terlihat dari laporan World Economic Forum (WEF), khususnya Global Competitiveness Index 2014-2015. Berdasarkan laporan tersebut, daya saing Indonesia meningkat empat posisi dan menduduki peringkat ke-34 dari 144 negara secara global.

b. Peningkatan Laju Ekspor

Indonesia menghadapi tantangan untuk berusaha menjadi pemain penting dalam perdagangan internasional. Baik perusahaan besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menghasilkan produk yang berdaya saing. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan penting untuk memprioritaskan kualitas produk dan layanan untuk

memastikan penerimaan di pasar global. Hal ini merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan upaya bersama baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan industri.

Laporan tahunan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyoroti bahwa Indonesia saat ini tidak diakui sebagai eksportir besar berdasarkan kontribusinya terhadap keseluruhan nilai ekspor global berbagai barang dan jasa. Dalam ranah perdagangan dunia, Indonesia dicirikan sebagai pengambil harga (price taker) dan bukan penentu harga (price setter). Pengaruh pemerintah terhadap harga mata uang asing produk ekspor Indonesia hanya terbatas pada penyesuaian nilai tukar rupiah yang melibatkan tindakan devaluasi atau revaluasi.

Penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan cerdas yang memberikan peluang luas bagi pelaku industri. Hal ini mencakup memastikan bahwa kewajiban perpajakan wajar, menyederhanakan proses pengelolaan bisnis untuk menghindari peraturan yang berbelit-belit, dan menghilangkan tanda-tanda korupsi birokrasi dalam operasional bisnis. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menumbuhkan semangat masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor.

Di sektor jasa, pemerintah memainkan peran penting, khususnya dalam inisiatif seperti program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemahiran bahasa asing. Hal ini memungkinkan pekerja Indonesia bersaing secara efektif dengan pekerja di luar negeri. Selain itu, menyederhanakan proses sertifikasi keterampilan harus menjadi prioritas, memastikan bahwa proses tersebut efisien dan tidak terlalu rumit.

Pekerja migran Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri hendaknya mengoptimalkan keterampilannya dengan mengikuti berbagai seminar dan program pelatihan keterampilan untuk menambah wawasannya. Penting untuk menghindari stigma negatif yang terkait dengan pekerja Indonesia di luar negeri, yang berarti kurangnya keterampilan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Saat ini, kecakapan tenaga kerja kita di luar negeri masih berada di bawah Filipina. Salah satu contohnya adalah situasi di Singapura, dimana tenaga kerja asing (TKA) asal Filipina yang bekerja di sektor informal lebih dihargai dibandingkan tenaga kerja Indonesia. Kesenjangan ini disebabkan oleh kemampuan bahasa Inggris pekerja Indonesia yang dianggap kurang mahir. Kolaborasi yang konsisten antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mengatasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, sehingga memastikan daya saing mereka di panggung global.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam menjamin kualitas produk dalam negeri. Di sektor industri, mengatasi permasalahan yang terkait dengan akses terhadap modal yang cukup, teknologi informasi yang kuat, dan tenaga kerja terampil, serta menyelaraskan keahlian kewirausahaan, manajemen organisasi, dan integrasi teknologi maju dan sumber daya lainnya, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi produk-produk berkualitas tinggi. barang dalam negeri. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan pengusaha sangat penting dalam menumbuhkan lingkungan kondusif yang berujung pada terciptanya hasil produksi perusahaan yang unggul.

c. Pemberdayaan UMKM

Kerapuhan aspek fundamental perekonomian Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor yang terkenal dengan daya serap tenaga kerja yang besar ini memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan bersaing dengan perusahaan padat modal. Ketahanan UMKM memang tidak bisa dipungkiri, terbukti dengan mampu tumbuh dan berperan penting dalam perekonomian, khususnya pasca krisis ekonomi.

Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan modal

kerja, kurangnya sumber daya manusia terampil, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Selain itu, UMKM juga menghadapi permasalahan seperti prospek usaha yang tidak jelas dan perencanaan, visi, dan misi yang belum lengkap. Hal ini sering dikaitkan dengan fakta bahwa UMKM terutama berfokus pada peningkatan pendapatan, yang ditandai dengan kepemilikan keluarga, penggunaan teknologi yang relatif sederhana, terbatasnya akses terhadap modal, dan tidak adanya batas yang jelas antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuntut kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan global. Hal ini mencakup fokus pada peningkatan inovasi produk dan layanan, mendorong pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta memperluas jangkauan pasar. Upaya-upaya ini penting untuk meningkatkan nilai pasar UMKM, khususnya memungkinkan mereka bersaing secara efektif terhadap masuknya produk asing ke sektor industri dan manufaktur di Indonesia. Penting untuk disadari bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi penting yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai sarana penting bagi Indonesia untuk pulih dari krisis ekonomi. Selain itu, pertumbuhan UMKM juga berakar pada perekonomian domestik, sejalan dengan tren yang lebih luas dimana sektor perekonomian Indonesia didominasi oleh kekuatan domestik. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh UMKM di Indonesia, yang merupakan sektor yang terus berkembang. Beroperasi dalam ranah pasar bebas, UMKM dapat mengatasi kekhawatiran akan dibayangi oleh barang-barang impor. Ketahanan mereka terletak pada peningkatan nilai-nilai lokal, yang merupakan pertahanan utama terhadap produk asing.

Ketergantungan pada nilai-nilai lokal merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap UMKM di Indonesia. "Lokal" muncul sebagai kekuatan baru, dengan ciri khas setiap produk UMKM yang menjadi kunci kelangsungan dan keunikannya. Keterkaitan antara produk lokal, komunitas lokal, dan segmen pasar lokal terlihat jelas. Dengan mengedepankan nilai-nilai lokal, terdapat potensi bagi segmen pasar UMKM lokal untuk menarik minat pasar global di masa depan. Keunikan tersebut bisa dibayangkan, mampu mendongkrak reputasi produk UMKM lokal Indonesia mampu bersaing dengan merek-merek ternama di pasar internasional.

Setiap merek, termasuk produk lokal, harus memasukkan "nuansa global" untuk melengkapi produk lokal agar dapat masuk ke pasar luar negeri, dan memastikan produk tersebut diterima dengan baik di negara lain. Daya tarik global ini tidak mengharuskan penghapusan unsur-unsur lokal khas yang telah mendefinisikan produk tersebut sejauh ini. Mempertahankan identitas lokal pada suatu produk UMKM dapat menjadikannya berkesan sebagai produk representasi dari daerah asalnya. Meski beroperasi dalam lingkup terbatas, UMKM harus mengadopsi pola pikir global. Dengan memanfaatkan produk unik mereka, mereka dapat memasarkan produk lokal yang luar biasa dan bersaing secara efektif melawan raksasa pasar global.

Meski memiliki potensi besar, UMKM menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas dan mengakses sumber daya penting untuk produktivitas. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM meliputi, pertama, rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang di bawah standar, khususnya di bidang manajemen, organisasi, kemahiran teknologi, dan pemasaran.

Kedua, adanya kendala dalam mengakses permodalan, sehingga menimbulkan hambatan besar bagi UMKM untuk memperluas kapasitas usaha atau meningkatkan daya saing produknya. Meskipun ada upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini melalui

berbagai skema kredit yang mudah diakses dan terjangkau, UMKM masih merasa kesulitan untuk memanfaatkan peluang ini.

Ketiga, masih terdapat kekurangan yang signifikan dalam penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pengetahuan pasar di kalangan UMKM. Memenuhi persyaratan ini memerlukan biaya yang besar, terutama ketika mencoba melakukan pengelolaan mandiri oleh UMKM. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah harus menerapkan strategi pemberdayaan UMKM yang matang.

Enam prioritas strategis sangat penting untuk meningkatkan kinerja UMKM. Pertama, mempermudah akses permodalan bagi UMKM. Kedua, memperluas jaringan pemasaran untuk memperluas jangkauan. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan UMKM. Keempat, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai. Kelima, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Terakhir, memperkenalkan teknologi tepat guna untuk mendukung operasional UMKM.

Dinas Koperasi dan UMKM yang mempunyai tugas membina pengembangan dan perluasan UMKM harus aktif menggalakkan pendirian sentra UMKM. Pada saat yang sama, terdapat kebutuhan untuk melatih konsultan Layanan Pengembangan Bisnis (BDS) yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika bisnis. Hal ini menjadi sangat penting di era persaingan global saat ini, dimana UMKM dituntut untuk mahir memanfaatkan teknologi dalam mengakses beragam informasi terkait bisnis.

Jika pendekatan program yang kohesif diterapkan secara konsisten, maka pertumbuhan UMKM yang luar biasa akan menjadi lebih dari sekedar aspirasi. Potensi yang dihadirkan baik di pasar domestik maupun global memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam negeri sendiri, dibandingkan dimanfaatkan oleh pengusaha dari negara lain.

Oleh karena itu, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan melalui pendekatan UMKM dan BDS center harus menjadi prioritas pemerintah. Namun, masih ada pertanyaan mengenai komitmen tulus pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Seperti yang terlihat dan diamati oleh masyarakat, UMKM kerap menjadi komoditas politik bagi para politisi yang mencari dukungan pada pemilu. Ketika pemilu telah usai dan para politisi sudah mendapatkan posisi mereka sebagai pejabat negara, UMKM seringkali tidak mendapat dukungan dan, dalam beberapa kasus, menghadapi konsekuensi hukum dengan tuduhan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

d. Perbaikan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek yang krusial dan sangat diperlukan dalam percepatan proses pembangunan nasional. Sektor ini memainkan peranan penting sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, mengingat pentingnya sektor ini dalam mendukung elemen-elemen penting seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pada dasarnya mendukung pembangunan ekonomi lebih lanjut. Namun, kenyataan yang terjadi selama bertahun-tahun masih membingungkan, karena perbaikan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang diantisipasi belum terwujud seperti yang diharapkan.

Misalnya, pergerakan barang sangat terhambat karena kondisi infrastruktur yang memburuk, dan sistem logistik yang sangat rapuh. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, yaitu sekitar 6 persen selama dua tahun terakhir, kondisi infrastruktur belum menunjukkan peningkatan yang sama. Faktanya, infrastruktur yang ada telah mengalami kerusakan, ditambah dengan kejadian alam yang merugikan, sehingga menimbulkan situasi yang memprihatinkan.

Daya saing produk Indonesia bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang kurang optimal dapat menghambat momentum ekspor

berbagai produk sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap permintaan luar negeri terhadap produk kita. Waktu transit yang lama juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk. Skenario ini juga mencakup permintaan layanan; Misalnya, penempatan tenaga kerja kita ke luar negeri memerlukan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja kita di luar negeri dapat segera dipenuhi.

Penting untuk diketahui bahwa kondisi infrastruktur di negara kita jauh dari harapan. Mengatasi permasalahan infrastruktur merupakan tanggung jawab penting pemerintah dan memerlukan penyelesaian yang cepat.

1. Memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, termasuk memperbaiki jalan berlubang dan tidak rata, yang beberapa di antaranya rusak akibat tanah longsor dalam waktu yang relatif singkat.
2. Membangun jalan tol atau jalur kereta api yang menghubungkan ke pelabuhan dan meningkatkan kapasitas pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan lainnya, yang berfungsi sebagai pintu gerbang penting bagi barang masuk dan keluar negara di tahun-tahun mendatang.
3. Meningkatkan kapasitas listrik internal dalam dua tahun ke depan dan seterusnya. Hal ini penting untuk memperlancar arus logistik, yang merupakan arteri penting perdagangan, memfasilitasi transportasi barang dan logistik antara pabrik dan pelabuhan, atau sebaliknya, dan dari pelabuhan ke pusat pemasaran.

Kebutuhan akan sarana transportasi yang memadai, termasuk jalan yang terawat dan fasilitas pelabuhan yang memadai, memerlukan perhatian yang serius dan terkoordinasi. Pencapaian infrastruktur yang kuat akan berdampak signifikan terhadap daya saing produk dalam negeri, dimana efisiensi pengiriman barang masuk dan keluar memainkan peran yang sangat penting. Menyadari betapa pentingnya infrastruktur, pemerintah harus menjadikannya sebagai prioritas utama. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang harmonis yang memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur, yang mencakup peningkatan pelabuhan, jalan, dan berbagai sarana transportasi. Khususnya, pembangunan fasilitas transportasi harus diperluas ke daerah pedesaan, mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri rumah tangga yang berkontribusi terhadap ekonomi kreatif dan meningkatkan nilai ekspor negara. Infrastruktur yang mudah diakses merupakan faktor penentu dalam memfasilitasi sirkulasi produk-produk yang berdaya saing tinggi, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tugas membangun infrastruktur di Indonesia sangatlah berat, mengingat adanya kesenjangan besar antara kondisi saat ini dan kebutuhan yang diperlukan. Luasnya wilayah negara ini memerlukan pembangunan infrastruktur dalam skala besar, melebihi kebutuhan yang umumnya ditemui di banyak negara lain. Serangkaian inisiatif yang terpadu dan penuh tekad sangat penting untuk benar-benar mencapai pembangunan infrastruktur yang adil dan berkualitas tinggi.

Percepatan pembangunan infrastruktur dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mulai tahun 2011 hingga 2025. Rencana komprehensif ini bertujuan untuk membangun infrastruktur penting guna membuka potensi ekonomi di wilayah-wilayah sepanjang enam koridor yang ditetapkan di seluruh negeri. Keenam koridor tersebut selanjutnya akan diintegrasikan dengan koridor ASEAN sehingga dapat mempercepat kelancaran pergerakan barang antar negara.

Inisiatif kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur akan terus digalakkan. Perangkat seperti regulasi, institusi, dan sumber daya manusia terus dikembangkan untuk memfasilitasi dan mengakomodasi permintaan

kolaborasi dari pihak swasta. Pemerintah secara aktif terlibat dalam melakukan promosi kepada investor asing, dengan menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan peraturan agar lebih menarik dan dapat diprediksi. Hal ini termasuk menangani peraturan terkait potensi risiko dan memastikan perlindungan yang memadai terhadap hasil investasi.

Aspek penting dalam keberhasilan penyediaan infrastruktur adalah penetapan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Seluruh jalan raya di seluruh negeri telah diberi kewenangan dan kewajiban khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Namun, yang masih belum jelas adalah seberapa efektif kolaborasi dapat dibina antara berbagai tingkat pemerintahan. Penting untuk memastikan bahwa setiap infrastruktur dan fasilitas, terlepas dari otoritas yang bertanggung jawab, selalu terpelihara dengan baik dan saling mendukung.

e. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi dicirikan sebagai keadaan dinamis vitalitas perekonomian suatu negara yang mencerminkan ketahanan dan kokohan. Hal ini mencakup kemampuan menumbuhkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bersumber dari eksternal maupun internal, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan utamanya adalah menjaga kelangsungan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berakar pada prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Ketahanan perekonomian diwujudkan dalam keadaan perekonomian nasional secara keseluruhan, yang ditandai dengan kemampuan mempertahankan stabilitas perekonomian yang kokoh dan dinamis. Hal ini juga mencakup pengembangan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena itu, fokus pembangunan ekonomi diarahkan pada penguatan ketahanan perekonomian melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjaminnya ketersediaan barang dan jasa, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing di kancah global.

Upaya mencapai ketahanan perekonomian yang diinginkan memerlukan pengembangan berbagai elemen untuk mendukungnya, antara lain:

1. Sistem perekonomian Indonesia berorientasi pada pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif, tersebar merata di seluruh nusantara, melalui perekonomian yang berpusat pada kerakyatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelancaran kemajuan pembangunan nasional dan ketahanan bangsa dan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.
2. Kerangka ekonomi distabilkan melalui keseimbangan yang harmonis dan terintegrasi antara sektor pertanian, industri, dan jasa, sehingga menjamin saling menguntungkan.
3. Pembangunan ekonomi merupakan usaha kerjasama yang berpedoman pada asas kekeluargaan, diawasi oleh anggota masyarakat, dan didorong oleh motivasi dan dorongan partisipasi aktif masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kesetaraan, dan stabilitas, penting untuk membina hubungan dan kemitraan di antara para pemangku kepentingan utama dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mencakup kerjasama antara Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan sektor informal.
4. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya secara konsisten diupayakan dengan menjaga pendekatan pembangunan yang seimbang dan harmonis antar wilayah dan sektor.
5. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kemandirian perekonomian nasional,

kemampuan bersaing harus dipupuk secara kuat dan dinamis. Hal ini melibatkan pemanfaatan sumber daya nasional secara optimal, didukung oleh infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat, untuk mengatasi tantangan secara efektif sekaligus memprioritaskan peluang kerja.

Berdasarkan strategi-strategi tersebut di atas, tentunya terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menghadapi tantangan global, khususnya pada tahun 2015. Berbagai inisiatif infrastruktur diharapkan tidak hanya akan meningkatkan daya saing perekonomian namun juga mengatasi permasalahan ketimpangan dan memitigasi kesenjangan harga di berbagai wilayah. Peran penting pembangunan infrastruktur juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Keberhasilan berbagai pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan karena sangat berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikasinya menunjukkan bahwa daerah dengan sistem infrastruktur yang berfungsi baik dan komprehensif cenderung memiliki tingkat kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan infrastruktur yang kurang berkembang.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur berfungsi sebagai modal sosial, yang mewakili barang modal penting yang menjadi landasan pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan prasyarat untuk memperlancar berbagai kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur berperan sebagai katalisator yang menghubungkan proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir. Kehadiran infrastruktur yang kuat memberikan wawasan mengenai kapasitas produktif masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin tercapai tanpa infrastruktur yang memadai, sehingga hal tersebut merupakan determinan fundamental atau landasan pembangunan ekonomi. Infrastruktur telah terbukti sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, menghubungkan daerah-daerah terpencil, dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu, dorongan berkelanjutan terhadap investasi infrastruktur dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangatlah penting. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sektor riil, menciptakan lapangan kerja untuk mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, serta merangsang investasi di berbagai sektor.

Harapannya, tantangan dan peluang pembangunan ekonomi pada tahun 2015 akan menjadi katalis untuk memaksimalkan upaya dan memanfaatkan momentum. Hal ini sangat penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif, mengatasi permasalahan kesenjangan, dan mempercepat pencapaian kemandirian ekonomi.

KESIMPULAN

Globalisasi yang tidak dapat dihindarkan, ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik positif maupun negatif.

Globalisasi membawa peningkatan produktivitas ekonomi, memungkinkan produksi lebih besar dengan jumlah usaha yang sama. Ekonom terkenal David Ricardo mengusulkan konsep keunggulan komparatif dalam perekonomian, dengan menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif yang unik. Oleh karena itu, menjadi penting untuk merumuskan strategi yang bertujuan memperkuat posisi Indonesia di kancah global di berbagai bidang. Sektor ekonomi menonjol sebagai bidang penting yang mempunyai

implikasi luas terhadap globalisasi. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan untuk segera menerapkan lima strategi penting di bidang perekonomian:

- 1) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian,
- 2) Mendorong Nilai Ekspor,
- 3) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
- 4) Memajukan Infrastruktur, dan
- 5) Memperkuat Ketahanan Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanantijo, Djoko. Strategi Dalam Menghadapi Persaingan Global. Surakarta
- Arief. 2009. Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. ISSN : 1907-5022. Bandung
- Aspan, Henry. 2011. Kebijakan Perdagangan Luar-Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Pemberlakuan Kesepakatan ASEAN Free Trade (AFTA). Vol 4 No.2. ISSN : 1979-5408. Medan
- Anabarja, Sarah. Kendala Dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community. Jawa Timur
- Wibowo, Arif, Kesiapan. Konsumen Indonesia Dalam Menghadapi AFTA 2015
- Sihombing, Jonker. 2013. Kerjasama ASEAN: Manfaat dan Tantangannya Bagi Indonesia. Law Review Volume XIII No.2. Karawaci
- Wr Rosidawati, Imas. Reinterpretasi Globalisasi: Menuju Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Masyarakat Indonesia
- Soesastro, Hadi. 2004. Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu. WPE 082